



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KECAMATAN KUBUNG**

**Laporan Kinerja  
Akuntabilitas  
Instansi Pemerintah  
( LKjIP )  
TAHUN 2019**

**KECAMATAN KUBUNG**  
**KABUPATEN SOLOK**  
**Jl.Raya Solok – Padang KM 3 Salayo**  
**2020**

# KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 maka OPD Kecamatan Kubung telah menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2019 dalam rangka menunjang Program Pemerintah Kabupaten Solok dalam membangun Kecamatan Kubung, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu kiranya Camat Kubung menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada Bupati Solok sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas di Kecamatan Kubung

Dalam menyusun laporan ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang memuat 1) latar belakang, 2) tugas, fungsi dan struktur OPD, 3) rencana strategis OPD, 4) permasalahan yang dihadapi. Khusus pada topik perencanaan kinerja akan menguraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang ini. Pada bagian akuntabilitas, nantinya akan menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Dengan dibuatnya laporan ini akan dapat diketahui apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, hasil yang telah dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Kubung juga dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya, jika ditemukan kekurangan maupun kekeliruan, kami berharap masukan yang membangun dari semua pihak.

Demikianlah Laporan ini kami buat dan kami sampaikan sebagai bahan seperlunya dan terima kasih.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Ringkasan Eksekutif

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Kecamatan
- 1.5 Sistematika Penulisan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kubung
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan yaitu menjalankan kewenangan Pemerintah dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan dalam rangka pembinaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan.

Dalam Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah menetapkan penetapan kinerja sebanyak 3 (Tiga ) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator kinerja yang didukung oleh 6 (enam) Program dan 19 (sembilan belas ) Kegiatan.

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam tahun anggaran 2019 dialokasi anggaran sebesar **Rp.488.840.000,-** dan terealisasi sebesar Rp.472.030.864,- atau jika diprosentasekan mencapai tingkat realisasi 92,96 %

Keberhasilan capaian indicator kinerja sasaran tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung dan tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator sasaran.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* akan terwujud jika pemerintahan berorientasi pada hasil, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan penyelenggaraan negara diukur melalui Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**). Dalam sistem ini ditetapkan perencanaan kinerja serta capaian yang dihasilkan sehingga pada akhir periode anggaran dapat dinilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran kinerja instansi dalam satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam sistem ini setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Tahun 2019 adalah sebagai berikut ;

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Parauran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerrja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kecamatan Kubung Tahun 2019 ini adalah;

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja, program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang;
5. Sebagai sarana dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )

### **1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN Kubung**

#### **1.4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Kubung**

Kecamatan Kubung yang luasnya 192 Km<sup>2</sup>, secara geografis terletak di sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Solok dan terletak pada posisi 0° - 45' Lintang Selatan dan 23° - 101° Bujur Timur.

Sebelah Utara : Berbatas dengan Kecamatan X Koto Singkarak

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kecamatan Gunung Talang

Sebelah Barat : Berbatas dengan Kecamatan Padang

Sebelah Timur : Berbatas dengan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

Topografi Kecamatan Kubung yang bervariasi terdiri dari dataran dan berbukit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti penanaman palawija, pisang, jeruk, padi, rambutan dan lain-lain.

Kecamatan Kubung terdiri dari 8 (delapan) Nagari Yaitu :

1. Nagari Koto Baru
2. Nagari Salayo
3. Nagari Gantuang Ciri
4. Nagari Koto Hilalang
5. Nagari Gauang

6. Nagari Saok Laweh
7. Nagari Panyakalan
8. Nagari Tanjung Bingkung

Penduduk Kecamatan Kubung berjumlah 59.367 jiwa yang terdiri dari 30.095 jiwa Laki-laki dan 29.272 jiwa Perempuan, mayoritas penduduk hidupnya sebagai petani sebagian kecil pedagang, pengusaha dan Pegawai Negeri.

## **1.4.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1.4.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bab III Tugas dan Fungsi Pasal 4 Ayat 1, **Kecamatan mempunyai tugas** sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, **Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan** yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25/Bup-



2016 tentang Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok yang meliputi :

1. Kewenangan Perizinan.
2. Kewenangan Rekomendasi.
3. Kewenangan Pembinaan
4. Kewenangan Pengawasan.
5. Kewenangan Fasilitasi.
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

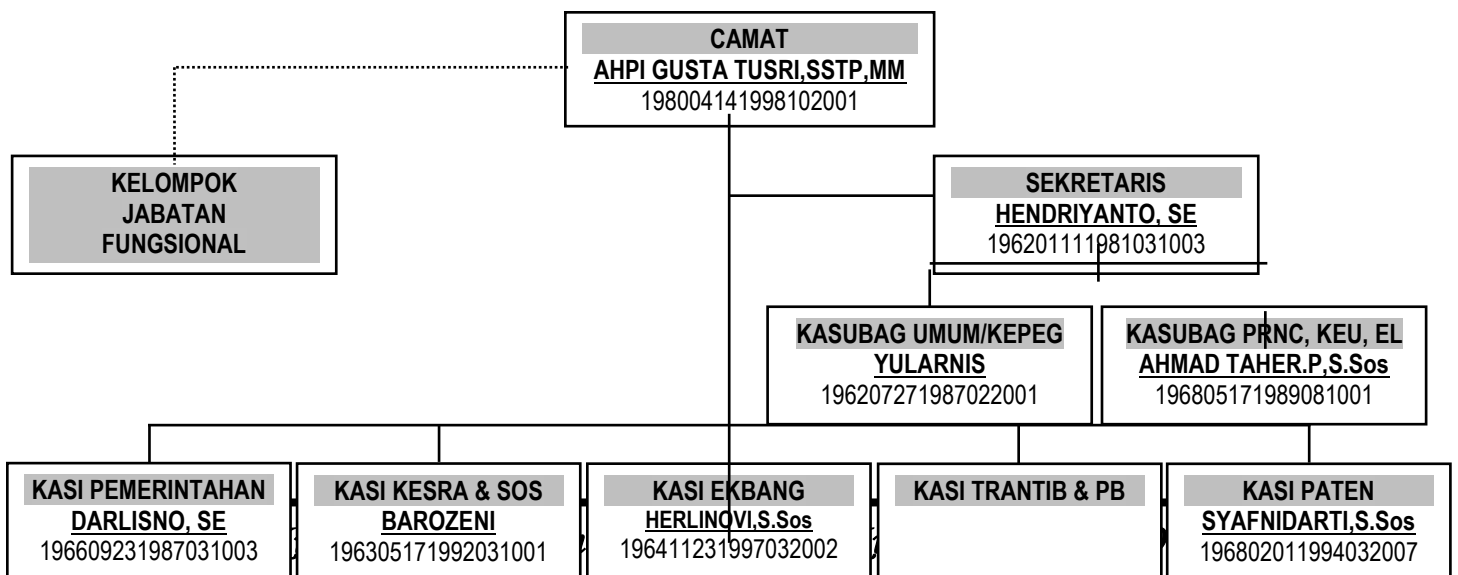
### 1.4.3 Struktur OPD Kecamatan Kubung

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Kubung dapat dilihat dari bagan berikut ini :

**Bagan 4.2**

**STRUKTUR OPD KECAMATAN KUBUNG**



### 1.4.3 Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Kubung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi , Kantor Camat Kubung memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Camat Kubung adalah sebagai berikut;

No	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2	
I	Juru Muda ( I.a )							
	Juru Muda Tingkat I ( I.b)							
	Juru ( I.c)		1					1
	Juru Tingkat I ( Id)							
II.	Pengatur Muda ( II.a)							
	Pengatur Muda Tk I ( II.b)							
	Pengatur ( II.c)			1				1
	Pengatur Tingkat I ( II.d)			1				1
III.	Penata Muda					2		2
	Penata Muda Tingkat I (III.b)					2		
	Penata ( III.c)					3		3
	Penata Tk I ( III.d)					4		5
IV	Pembina (IV.a)					3	2	5
	Pembina Tk I ( IV.b)							
	<b>JUMLAH</b>							<b>18</b>

**Tabel 1.2**  
**SDM KANTOR CAMAT KUBUNG**  
**BERDASARKAN JABATAN DAN JUMLAH PEGAWAI**

No	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1	ESELON III	2
2.	ESELON IV.A	4
3.	ESELON IV.B	2
4.	STAFF	12
5	TENAGA HARIAN LEPAS	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>

#### **1.4.4 Isu – isu strategis Organisasi ( Kecamatan Kubung )**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 ( lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kubung kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di kecamatan Kubung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut;

##### **a) Bidang sekretariat**

- Masih kurangnya Sumber Daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana computer di Kecamatan Kubung sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan computer;
- Kurangnya personil di bagian sekretariat Kecamatan Kubung sehingga banyak tenaga yang merangkap ttugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- Masih minimnya anggaran di Kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan belum bisa optimal untuk dilaksanakan.

##### **b) Bidang Pemerintahan**

- Kurangnya staf atau personil dalam data pemerintahan umum pengelolaan data Pemerintahan Nagari, pengelolaan data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

##### **c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- Kurangnya pemerataan pembangunan di Nagari
- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan usaha tani dan sanitasi lingkungan masih rendah.

#### **d) Bidang Pelayanan Terpadu dan Kesejahteraan Sosial**

- Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan pengelola kesejahteraan social, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesejahteraan social, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayana;

#### **e) Bidang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
- Kurangnya personil Linmas di masing-masing Nagari dan Linmas yang ada belum bekerja secara maksimal
- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kecamatan Kubung;

#### **f) Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

- Kurangnya personil pengelolaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak atau retribusi sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional
- Pembangunan infrastruktur di kecamatan Kubung sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan
- Kurangnya personil di bidang ekonomi dan pembangunan sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas.

### **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

#### **Bab I           Pendahuluan**

- 1.1     Latar Belakang
- 1.2     Tugas, Fungsi dan Struktur OPD Kecamatan Kubung
- 1.3     Rencana Strategis OPD Kecamatan Kubung
- 1.4     Permasalahan Utama yang Dihadapi
- 1.3     Sistematika Penyajian

#### **Bab II           Perencanaan Kinerja**

- 2.1     Perjanjian Kinerja Tahun 2019

#### **Bab III          Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1     Analisis Capaian Kinerja
- 3.2     Realisasi Anggaran

#### **Bab IV          Penutup**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Solok, oleh Karena itu Program kegiatan di Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagaimana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah "***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSAS ADAT BASANDI SYARA, SYARA' BASANDI KITABULLAH***" "

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi yang akan dilaksanakan adalah ;

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar ( wajar ) 12 Tahun
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas didukung oleh sarana dan prasarana insfrasturuktru yang memadai
4. Membangun karekter masyarakat sesuau Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan peran Kecamatan Kubung Tahun 2016 – 2021 tertuang misi kelima Kabupaten Solok yaitu Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersoh dengan tujuan ; untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersoh ( good governemence) berbasis pelayanan prima menuju masyarakat madani, sasaran yang akan di capai Kecamatan Kubung adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### **2.1.1 Tujuan**

Tujuan Rencana Stategis merupakan impementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 ( satu) hinga 5 ( lima ) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Kubung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan tertib administrasi Nagari
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

### **2.1.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kubung dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan Kubung adalah sebagai berikut ;

**TABEL 2.1 KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

<b>VISI</b>	<b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA' SYARA BASANDI KITABULLAH</b>	
<b>MISI</b>	<b>MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH</b>	
<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya kepuasa masyarakat terhadap pelayanan public
2.	Meningkatkan tertib administrasi Nagari	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

## 2.2 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi Program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupaya pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan di capai serta selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi , arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkeanaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah di paparkan selanjutnya disusun staregi dan arah kebijakan yang selengkapnnya dapat dilihat pada tabel ;

**TABEL 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Peningkatan SDM dan sarana serta Prasarana pelayanan publik	Pembangunan Bidang Pemerintahan
2.	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan adminstrasi	Peningkatan Kapasitas SDM perangkat Nagari	Penertuiban Tertib Administrasi
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pembanguann bidang pemerintahan

### 2.3 Sasaran dan Program

**TABEL 2.3 SASARAN DAN PROGRAM**

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan adminitrasi perkantoran</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</li> <li>4. Pemeliharaan kantrantabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> </ol>
2.	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ Nagari</li> </ol>
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisioasi masyarakat dalam membangun desa/ nagari</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan</li> <li>3. Pembinaan dan pasyarakatatan olah raga</li> </ol>



#### 1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah aduan masyarakat x 100%
		Prosentase gangguan tramtbmas yang ditindaklanjuti	Jumlah Gangguan Tramtbmas yang ditindaklanjuti/ Jumlah gangguan yang ada x 100%
2.	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	Persentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu	Jumlah Nagari Yang Melaporkan AND Tepat waktu/ Jumlah Nagari Keseluruhan x 100%
		Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	Jumlah Nagari yang menetapkan APB Tepat waktu / Jumlah Nagari keseluruhan x 100%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	Jumlah Tertampung/ Jumlah Seluruh Usulan x 100%
		Persentase Capaian PAD	Jumlah PAD yang terelir/Target PAD x 100%

## 1.5 RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Pada dasarnya Rencana Kinerja tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Kubung selama tahun 2019. Target kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		IKU	Target
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	IKM	3.41
		Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
		Prosentase gangguan transtibmas yang ditindaklanjuti	90%
2.	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan adminitasi	1. Persentase Nagari dengan pelaporan AND tepat waktu	90%
		2. Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	90%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dok RKPD	70%
		Persentase Capaian PAD	65%

## 1.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Unpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memperimbangkan Sumber Daya yang dikelolannya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar

penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment atau penghargaan dan sanksi

**TABEL 2.6 PENETAPAN KINERJA  
KECAMATAN KUBUNG 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<i>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i></li> </ul>	<i>3.41</i>	<i>Program Pelayanan Adm Perkatoran</i>	<i>189.000.000,-</i>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,-
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik	19.000.000,-
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas Operasional	1.000.000,-
				Penyediaan Jasa kebersihan kantor	1.000.000,-
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.500.000,-
				Penyediaan Barang Cerakan dan pengadaan	15.000.000,-
				Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	5.000.000,-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,-
				Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000,-
				Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	30.500.000,-
				Rapat-rapat konsultasi ke dalam daerah	44.500.000,-
				<i>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>57.920.000,-</i>
				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	8.300.000,-

				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	48.000.000,-
				Pemeliharaan rutin berkala mebel	1.620.000,-
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>750.000,-</b>
				Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	750.000,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklan juti</li> </ul>	90%	<b>Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal</b>	<b>10.000.000,-</b>
				Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehknik pencegahan kejahatan dan criminal	27.720.000,-
2.	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan admintrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Nagari dengan pelaporan AND Tepat waktu</li> </ul>	90%	<b>Program Peningkatan keberdayaan masy Pedesaan / Nagari</b>	<b>198.900.000,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	148.900.000,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Nagari denganj APB tepat wakti</li> </ul>	90%	Fasilitasi Kegiatan PKK	50.000.000,-
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dok RKPD</li> </ul>	70%	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Nagari</b>	<b>15.000.000,-</b>
				Penyelenggaraan Musyawarah pembangunan desa/nagari	15.000.000,-

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX /618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Prediket capaian kinerja dikelompokkan ke dalam

**Tabel 3.1 PREDIKET EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Sangat Baik	85-100
2.	Baik	70-85
3.	Sedang	55-70
4	Kurang Baik	>55

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Kinerja di Kecamatan Kubung  
Tahun 2019**

No	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator/Kegiatan/Output/Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1. Prog. Pelayanan admn perkantoran 2. Prog peningkatan sarana dan prasaran aparatur 3. Prog peningkatan pengembangan system capaian system pelaporan dan kinerja keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	3.41	3.40	99.70%

		Prog. Peningkatan kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Aduan	90%	90%	100%
			Prosentase Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti	Gangguan	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan /Nagari	Prosentase Nagari dengan pelaporan AND Tepat waktu	%	90%	90%	100%
			Prosentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	%	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen KPD	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ Nagari	Usulan	70%	65%	92.85%
			Prosentase Capaian PAD	%	65%	92.82%	142.8%
<b>PROSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>							<b>105.05%</b>

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Kubung telah dapat dilaksanakan tugas dalam rangka menvapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan baik. Jumlah sasarn yang ditetapkan setelah revieu sebanyak 4 ( empat ) sasaran strategis. Dengan melakukan evaluasi kinerja perlu dilakukan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya, kinerja nyata dengan target akhir renstr dan kienrja nyata dngan instasi yang lebih tinggi atau standar nasional

Adapun evaluasi dan analisis tingkat kinerja dari satu sasaran stratetegis tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut ;

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>	<b>:</b>	<b>MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK</b>
----------------------------	----------	---

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan kualitas public di Kecamatan. Indikator untuk mencapai sasaran strategis ini terdiri 3 Indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang di tindak lanjuti
3. Prosentase gangguan tramtibmas yang di tindak lajuti

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari tabel berikut ini

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR  
1 PADA TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	<b>IKM</b>	3.41	3.40	99.70%

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public. Tujuan adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara playanan public

Adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksud untuk ;

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara publik
2. Mengukur secara berka penyelngra pelayanan yang tealah dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan pubilk
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu di ambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai upman balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubung pada Tahun 2019 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Kubung yang memperoleh pelayanan sebanyak responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini ada jenis pelayanan, yaitu Pelayanan Umum, Dispensasi Nikah, Surat Keterangan,



Adapun data survey hasil kepuasan masyarakat di Kecamatan Kubung tahun 2019 adalah sebagai berikut ;

No	UNSUR PALAYANAN	NILAI IKM	NRR PER UNSUR	NILAI IKM KONVERSI	MUTU PELAYANAN
1.	Persyaratan	3.27	0.36	81.75	B
2.	Sistem, Mekanisme dan Proseduer	3.30	0.34	82.38	B
3.	Waktu Penyelesaian	3.25	0.32	81.37	B
4.	Biaya/Tarif	3.90	0.44	97.52	A
5.	Produk, spesifikasi, Jenis Pelayanan	3.29	0.35	82.14	B
6.	Kompetensi Pelaksana	3.32	0.34	83.07	B
7.	Perilaku Pelaksana	3.34	0.36	83.62	B
8.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	3.28	0.34	81.91	B
9.	Sarana dan Prasarana	3.64	0.39	90.99	A
<b>10.</b>	<b>Nilai Rata -Rata</b>	<b>3.40</b>	<b>0.36</b>	<b>84.97</b>	<b>B</b>

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai yang mendapat Nilai B adalah Persyaratan, Ssitem Mekanisme dan prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk, Spesifikasi, dan Jenis Layanan, Kompetensi pelaksanaan, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Sedangkan yang mendapat Nilai A adalah Biaya Tarif dan Sarana dan Prasarana. Secara rata-rata nilai IKM Kecamatan Kubung adalah **B ( BAIK )**

#### **B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	-	3.40	3.41	-	3.41	3.40	-	100.29	99.70	3.42	99.41%

**D PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Pada tahun 2019 terjadi penurunan kinerja pada indeks kepuasan masyarakat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Oleh ;

- Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kubung sangat terbatas. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Kecamatan diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang ditetapkan.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi
- Sarana dan prasana yang masih kurang memadai

**Solusi yang telah dilakukan ;**

- Optimalisasi Tenaga Harian Lepas di bagian front office untuk memberikan pelayanan prima ke masyarakat.
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kubung

**E ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dari sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 4 Program Kegiatan sebagai berikut ;

No	SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99.70%	98.94%	0.76

Efisiensi dari penggunaan sumber daya pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 0.76 %, hasil perhitungan ini didapat dari selisih capaian kinerja 99.70% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98.94 %

**F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>(1) Program Pelayanan Adm Perkantoran</b>	<b>189.000.000,-</b>	<b>181.365.240,-</b>	<b>90.12%</b>
		• Penyediaan Surat Menyurat	1.500.000,-	1.500.000,-	100%
		• Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	19.000.000,-	14.710.860,-	95.00%
		• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.000.000,-	949.000,-	99.00%
		• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.000.000,-		0%
		• Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.500.000,-	22.500.000,-	100%
		• Penyediaan Barang catekan dan Penggandaan	15.000.000,-	14.999.800,-	99,99%
		• Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
		• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	14.000.000,-	12.245.000,-	98.11%
		• Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000,-	34.863.000,-	99.94%
		• Rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	30.500.080,-	30.101.080,-	98.56%
		• Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	45.000.000,-	44.495.000,-	99.89%
		<b>(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>57.920.000,-</b>	<b>57.741.750,-</b>	<b>99.64%</b>
		• Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	8.300.000,-	8.300.000,-	100%
		• Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / opsional	48.000.000,-	47.991.750,-	99.97%
		• Pemeliharaan rutin berkala peral. dan perlengkapan kantor	1.620.000,-	1.450.000,-	98.02%

		<b>(3) Program Peningkatan Pengembangan Capaian system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>750.000,-</b>	<b>750.000,-</b>	<b>100%</b>
		• Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	750.000,-	750.000,-	100%

#### G. RENCANA TINDAK LANJUT

- Pengusulan untuk mengisi jabatan yang lowong di Kecamatan Kubung, dimana pertengahan tahun 2019 terjadi kekosongan pejabat di Kantor Camat Kubung, hal ini dilakukan dengan pengusulan kepada BKSDM untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut
- Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Kecamatan

*Indikator 2 : Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang di tindak lanjuti*

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 PADA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%

Dilihat dari sasaran 1 indikator 2 ini yaitu Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti di kecamatan Kubung pada tahun 2019 targetnya adalah 90 % dan dapat direalisasikan sebanyak 90 %.

**B PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1.	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Aduan	-	90%	90%	-	90%	90%	-	100%	100%	100%	

**C PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kubung sangat terbatas. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Kecamatan diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang di tetapkan.
- Hubungan yang baik dengan Wali Nagari, Pemuka Masyarakat sehingga koordinasi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dapat teratasi dengan baik

**Solusi yang telah dilakukan ;**

- Optimalisasi SDM yang ada di Kecamatan
- Memberikan layanan pengaduan berupa kotak saran di Kecamatan Kubung
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kubung
- Kerjasama yang baik dengan Forkompincam

**D ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dari sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 1 Program Kegiatan sebagai berikut ;

No	SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	99%	1%

Efisiensi dari penggunaan sumber daya pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah %, hasil perhitungan ini didapat dari selisih

capaian kinerja 99.70% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98.94 %

**E ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
1.	Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti				
		(1) Program peningkatan Kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik pencegahan kejahatan	27.270.000,-	26.804.300,-	99.00%
		• Peningkatan kerjasama dengan aparat kemananan dalam teknik pencegahan kejahatan	27.270.000,-	26.804.300,-	99.00%

**F RENCANA TINDAK LANJUT**

- Pengusulan untuk mengisi jabatan yang lowong di Kecamatan Kubung, dimana pertengahan tahun 2019 terjadi kekosongan pejabat di Kantor Camat Kubung, hal ini dilakukan dengan pengusulan kepada BKSDM untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut di seksi trantib sehingga pengaduan masyarakat lebih menjadi sinkronisasi.
- Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Kecamatan

*Indikator 3 : Prosentase Gangguan Yang ditindaklanjuti*

**A PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3 PADA TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Prosentase gangguan yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%

Dilihat dari sasaran 1 indikator 3 ini yaitu Prosentase Gangguan Tramtibmas yang yang ditindaklajuti pada tahun 2019 targetnya adalah 90 % dan dapat direalisasikan sebanyak 90 %. Adapun yang dapat direalisasikan 90% ;

- o Tindak pidana pencurian
- o Penyakit masyarakat

**B PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1.	Prosentase gangguan tramtibmas yang ditindaklajuti	Aduan	-	90%	90%	-	90%	90%	-	100%	100%	100%	

**C PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kubung sangat terbatas. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Kecamatan diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang di tetapkan.
- Hubungan yang baik dengan Wali Nagari, Pemuka Masyarakat sehingga koordinasi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dapat teratasi dengan baik

**Solusi yang telah dilakukan ;**

- Optimalisasi SDM yang ada di Kecamatan
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kubung
- Kerjasama yang baik dengan Forkompincam

#### D ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 4 Program Kegiatan sebagai berikut ;

No	SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Prosentase Gangguan Tramtimbas yang ditindaklanjuti	100%	99%	1%

Efisiensi dari penggunaan sumber daya pada Indikator ini adalah 1% %, hasil perhitungan ini didapat dari selisih capaian kinerja sebesar 100% ( target 90% dan tercapai 90% ) dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99%

#### E ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
1.	Prosentase Gangguan Tramtibmas yang ditindaklanjuti				
		(2) Program peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	27.270.000,-	26.804.000,-	99.00%
		• Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	27.270.000,-	26.804.000,-	99.00%

#### F RENCANA TINDAK LANJUT

- Pengusulan untuk mengisi jabatan yang lowong di Kecamatan Kubung, dimana pertengahan tahun 2019 terjadi kekosongan pejabat di Kantor Camat Kubung, hal ini dilakukan dengan pengusulan kepada BKSDM untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut di seksi trantib sehingga pengaduan masyarakat lebih menjadi sinkronisasi.



- o Kerjasama yang baik dengan wali nagari, forkompincam dan tokoh masyarakat

**SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KEPATUHAN NAGARI DALAM PENATAAN ADMINISTRASI**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan peningkatan tertib administrasi Pemerintahan Nagari

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kubung dilakukan penghitungan berdasarkan dua pendekatan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut ;

1. Presentase Nagari dengan AND Tepat waktu
2. Presentase Nagari yang menetapkan APB Tepat waktu

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 PADA TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan Nagari dalam Penataan Adminitrası Nagari	Presentase Nagari dengan Pelaporan Alokasi Dana Nagari Tepat waktu	90%	90%	100%
		Prosentase Nagarai Dengan APB Tepat Waktu	90%	90%	100%

Presentase Capaian Nagari dengan Pelaporan AND tepat waktu dan APB Tepat waktu adalah 100% sedangkan dilihat dari relisasinya adalah masih berkisar 90 %.

Penyebab belum maksimalnya Prosentase Pelporan AND dan APB tepat waktu adalah karena ;

1. Sumberdaya Manusia yang di Nagari yang mengelola Alokasi Dana Nagari dan APB Nagari masih minin sehingga memperlambat proses percepatan Alokasi Dana Nagari dan APB Nagari sehingga memperlambat proses ferivikasi

**B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1.	Prosentase Nagarai dengan AND Tepat waktu	Nagari	-	90%	90%		90%	90%		100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase Nagari dengan APB Tepat watu	Nagari		90%	90%		90%	90%		100%	100%	100%	100%

**C PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Pada tahun 2019 Nagari yang dapat menyelesaikan ALokasi Dana Desa dan APB tepat waktu adalah 90 %

**Penyebab keberhasilan tersebut**

- Kesadaan aparatur Nagari dalam melaksanakan administrasinya sudah mulai baik walau belum dapat dilaksanakn tepat pada waktunya
- Koordinasi yang baik antar lembaga mulai dari Kecamatan sampai ke DPMN sehingga pengesahan APB Nagari dapat terlaksana tepat waktu
- Sosialisasi dan monitoring yang yang dilakukan baik tim monev Kabupaten maupun tim monev Kecamatan berlangsung kontiniu

**Hal-hal atau solusi yang telah dilakukan**

- Pembinaan secara rutin dan berkala ke Nagari-nagari melalui monitoring dan evaluasi
- Reviue sederhana terhadap Alokasi Dana Nagari dan APB Nagari sebelum dilanjutkan ke DPMN

**E ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No	SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kepatuhan Nagari dalam Penataan administrasi	Prosentase Nagari dengan AND Tepat waktu	100%	98.19%	2.19%
		Prosentase Nagari dengan APB Tepat waktu	100%	98.19%	2.19%

**F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Nagari dengan pelaporan alokasai dana desa (AND) tepat waktu</li> <li>Prosentase Nagari dengan APB tepat waktu</li> </ul>	(1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	198.900.000,-	190.791.700,-	92.19%
		• PLO	148.900.000,-	143.029.000,-	96.82%
		• Fasilitasi PKK	50.000.000,-	47.762.700,-	98.78%

**G. RENCANA TINDAK LANJUT**

- Pembinaan akan lebih diintensifkan di tahun anggaran 2020
- Optimalisasi Tim Monev Kecamatan terutama peningkatan SDM Tim monev

<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>	<b>:</b>	<b>MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>
----------------------------	----------	--

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan peningkatan Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 PADA TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	<b>MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	1. Prosentase usulan yang tertampung dalam dokumen RKPD	70 %	65%	92.85%
		2. Persentase Capaian PAD	65%	92.82%	142.80%

Formulasi pengukuran yang digunakan untuk mengukur indicator di atas adalah jumlah usulan dibagi dengan total usulan masyarakat dikali 100%

**B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1.	Prosentase usulan musrenbang yang tertampung dalam dokumen RKPD		-	65%	70%	-	60%	65%	-	92.30%	92.85%	100%	
2.	Persentase Capaian PAD		50	55%	65%	55%	87	92.82%	110%	158%	142.8%	100%	

## **E PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kinerja pada indikator ini . Hal ini disebabkan

- Karena mulai dari tingkat nagari telah dilakukan penyaringan usulan kegiatan yang betul- betul akan terakomodir dalam RKPD melalui rembuk jorong dan dilanjutkan dengan Murenbang Tingkat Nagari dan kemudahan Musrenbang Tingkan Kecamatan
- Aparatur Nagari dapat memantau dengan baik usulan mereka karena telah memakai aplikasi e\_planing di masing-masing Nagari
- Sarana dan prasarana di masing-masing nagari yang memadai
- Dalam targer PAD keberhasilan pencapaian target adalah sudah mulai tingginya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB

### **Hal –hal atau solusi yang telah dilakukan**

- Pendampingan yang sinergis terhadap masyarakat mulai dari penyusunan rembuk jorong, rembuk nagari dan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan di Nagari
- Sosialiasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran IMB

## **E ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGUNNAAN SUMBER DAYA**

Dari sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan terdapat 2 Kegiatan dengan capaian anggaran 99.31 % dan realisasi kinerja sebesar 92.85%

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Prosentase usulan masyarakat yang tertampung dalam dokumen RKPD	92.85%	99.31%	6.46
		2. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	92.82%	100%	7.18

**F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG  
KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN  
PENCAPAIAN  
PERNYATAAN KINERJA**

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1.	Prosentase usulan masy yang tertampung dalam dokumen RKPD	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Nagari	15.000.000,-	13.674.800,-	97.31
		• Kegiatan Musrenbang	15.000.000,-	13.674.800,-	97.31

Dengan adanya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ Nagari yang tertauang kegiatan nya dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan, maka aspirasi masyarakat masing-masing Nagari dapat tersalurkan. Untuk tahun 2018 dan 2019 Musrenbang baik tingkat Nagari maupun tingkat Kecamatan langsung diinput melaluae e paling. Sehingga program dak kegiatan pemerintah yang akan disalurkan ke masyarakat harus sejalan dengan usulan yang ada pada arosuka plan yang telah di entrikan oleh masing-masing admin.

**G. RENCANA TINDAK LANJUT**

- Anggaran APBD yang terbatas menyebabkan semua aspirasi masyarakat tidak dapat tertampung dan terakomodir 100% oleh Pemerintah Daerah untuk itu, dilakukan sosialisai ke masyarakat agar dapat mengoptimlakan penggunakam dana desa untuk pembangunan dalam skala kecil
- Optimalisasi dana desa dan sumber daya yang ada di Nagari maupun Kecamatan.

**3.3 Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah di tetapkan pada Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, Kecamatan Kubung tersedia anggaran belanja dan realisasi pada tahun 2019 sebagai berikut ;

**TABEL REALISASI ANGGARAN 2019  
KECAMATAN KUBUNG**

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Anggaran	%
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>579.000.000,-</b>	<b>560.000.000,-</b>	<b>87.86%</b>
	• Tambahan Penghasilan PNS	577.000.000,-	560.050.000,-	88.06%
	• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,-	-	0%
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>488.840.000,-</b>	<b>456.339.790,-</b>	<b>98.12%</b>
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.000.000,-	181.365.240,-	97.12%
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,-	1.500.000,-	100%
	• Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	19.000.000,-	14.710.000,-	78.73%
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	949.600,-	949.600,-	59.70%
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.000.000,-	1.000.000,-	0
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.500.000,-	22.500.000,-	100%
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,-	14.999.800,-	100%
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,-	12.245.000,-	99.11%
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000,-	34.863.900,-	99.94%
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.500.000,-	30.101.080,-	95.56%
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	44.500.000,-	44.495.000,-	99.89%
	2. Program Peningkatan	57.920.000,-	57.741.750,-	99.64%

	Sarana dan Prasarana Aparatur			
	• Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	8.300.000,-	8.300.000,-	100%
	• Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/opersional	48.000.000,-	47.991.750,-	99.97%
	• Pemeliharaan Rutin Berkala mebeleur	1.620.000,-	1.450.000,-	94.02%
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah	750.000,-	750.000,-	100%
	• Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	750.000,-	750.000,-	100%
	4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	198.900.000,-	190.791.700,-	98.19%
	• PLO	148.900.000,-	143.029.000,-	97.82%
	• Fasilitasi Kegiatan PKK	50.000.000,-	47.762.700,-	99.78%
	5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/ Nagari	15.000.000,-	13.674.800,-	99.31%
	• Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	15.000.000,-	13.674.800,-	99.31%
	6. Peningkatn Kerjasama dengan Aparat Kemananan dalam teknik pencegahan tindak kriminla	27.270.000,-	26.804.300,-	99.00%
	• Peningkatan Kerjasama dengan aparat kemananan dalam teknik pencegahan kejahatan	27.270.000,-	26.804.300,-	99.00%
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>579.000.000,-</b>	<b>560.050.000,-</b>	<b>87.86%</b>
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>488.840.000,-</b>	<b>471.127.790,-</b>	<b>98.12%</b>



# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Kecamatan Kubung misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 4.2 Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Kecamatan Kubung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Kubung dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari factor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3. Perangkat nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum dikerjakan secara rutin

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

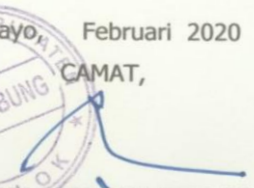
1. Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menukung kegiatan.
3. Mengadakan pembinaan administrasi Nagari secara bertahap di 8 (delapan) Nagari se-Kecamatan Kubung.

### 4.3 Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Kubung selama tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, namun demikian pada hasil **(outcome)**, manfaat **(benefit)** dan dampak **(impacts)** masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut ditahun 2019. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang . Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2019 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya kemajuan di masa yang akan datang.

Salayo, Februari 2020  
CAMAT,  
  
**RICKY CARNOVA, SSTP, MM**  
**NIP.19810618 200112 1 002**

